



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Kompas

Warga Butuh Kepastian Biaya Sewa Rusun

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjanjikan kelonggaran biaya sewa rusun bagi warga relokasi. Namun, warga belum mendapat informasi tentang kebijakan ini. Warga membutuhkan kepastian, termasuk soal tempat berusaha, guna memulihkan kondisi ekonominya.

Pada November 2023, Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pemberian Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar kepada Wajib Retribusi dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Pascapandemi Covid-19. Artinya, penghuni rusun kembali membayar biaya sewa setelah gratis selama pandemi Covid-19.

Akan tetapi, warga relokasi dari Rusunawa Marunda ke Rusun Nagrak di Jakarta Utara keberatan dengan kembali normalnya biaya sewa itu. Mereka terdiri atas 451 keluarga yang direlokasi karena kondisi rusun dinilai sudah tidak layak untuk dihuni pada 30 Agustus 2023.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Joko Agus Setyono memastikan sudah ada kelonggaran biaya sewa bagi warga relokasi ke Rusun Nagrak. "Ada kelonggaran tarif rusun dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta. Kelonggaran mengikuti perjanjian sebelumnya," ujar Joko,

Selasa (19/12/2023).

Kesepakatan relokasi, antara lain, warga nantinya harus membayar biaya sewa Rp 505.000 sampai Rp 765.000 per bulan. Biaya ini lebih tinggi daripada sewa Rusunawa Marunda sebesar Rp 144.000 per bulan.

Selain itu, pemerintah juga menyediakan lapak dagangan bagi warga relokasi. Namun, lapak ini belum selesai dibangun sehingga warga yang sebagian besar berjualan tidak punya pendapatan harian.

Butuh kepastian

Dalam salinan surat edaran yang diterima *Kompas*, pembayaran biaya sewa terhitung per 1 Desember 2023. Pembayaran autodebet melalui Bank DKI dengan catatan tidak melewati tanggal 20 setiap bulan agar tak kena denda.

Hendra (40), warga RT 003 RW 012, belum mendapatkan informasi adanya keringanan biaya sewa dari pengelola Rusun Nagrak atau perangkat daerah. Namun, dalam pertemuan dengan pengelola rusun, sudah disampaikan keberatan warga, mulai dari pembayaran sewa unit yang mendadak hingga lapak jualan yang belum rampung.

"Kami terbebani. Tempat usaha yang dijanjikan belum terealisasi," katanya.

Menurut Hendra, warga ti-

dak lari dari tanggung jawab. Mereka hanya meminta ada keringanan. Salah satu buktinya, selama ini warga tidak menunggak pembayaran biaya pemakaian air dan listrik.

Oktober lalu, warga relokasi sudah menyampaikan kebutuhan tempat berjualan kepada Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat peninjauan ke Rusun Nagrak. Warga meminta pembangunan tempat berjualan dipercepat agar mereka dapat memiliki penghasilan. Selama ini, mereka bergantung pada bantuan tetangga di kanan-kiri blok hunian.

Saat itu, Heru menyanggupi dan meminta jajarannya segera memenuhi kebutuhan warga agar tak timbul masalah sosial dan ekonomi.

Warga juga menyampaikan hal itu kepada Komisi D DPRD DKI Jakarta. Selanjutnya, DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI Jakarta mempertimbangkan kembali kebijakan mengenakan biaya sewa normal, mengingat belum semua penghuni rusun pulih dari dampak pandemi Covid-19.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mengingatkan agar suatu kebijakan jangan sampai menambah kesulitan ekonomi warga. Patut dipertimbangkan apakah warga sudah siap untuk membayar atau belum. (DAN)